



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 123 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 639);

7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENGHITUNGAN

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokkan :

- a. Kendaraan Bermotor selain Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan
- b. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Selain Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck dan truck;
- d. mobil roda tiga;

- e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan H PU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama Bulan Desember Tahun 2016.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB untuk kendaraan bermotor jenis *pick up, light truck dan truck* sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini adalah NJKB harga dasar (*chasis cabin*) yang belum ditambahkan nilai jual ubah bentuk.
- (3) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).

- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. *Blind van* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - f. *Pick up* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - g. Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - i. *Light Truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - j. *Truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang diberikan insentif sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang diberikan insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang diberikan insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pengenaan PKB kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah :
- a. kendaraan angkutan umum orang atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang,
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang/Izin Trayek/Kartu Pengawasan/Pengendalian; dan
 - c. memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pengenaan PKB kendaraan bermotor angkutan umum barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) adalah :

- a. kendaraan bermotor angkutan umum barang atas nama kepemilikan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang; dan
 - b. memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku
 - c. Surat Izin Tempat Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan (SITU SIUP) bergerak di bidang angkutan umum barang dan/atau orang.
- (3) Apabila persyaratan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan PKB dan BBN-KB kendaraan pribadi sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari dasar pengenaan sebagaimana tercantum pada kolom 6 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang untuk pendaftaran baru, mutasi masuk dan perubahan status dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) untuk dapat memperoleh pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum yang akan melakukan perubahan status menjadi kendaraan pribadi, dikenakan selisih pembayaran PKB dari Plat Kuning (umum) ke Plat Hitam (pribadi) dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal jatuh tempo berikutnya

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan H PU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 12

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Terhadap perhitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

dilakukan pembulatan dengan ketentuan.

- (1) Untuk kendaraan roda empat atau lebih dibulatkan dalam jutaan rupiah dengan ketentuan lebih kecil dari Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke bawah dan apabila sama atau lebih besar dari Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke atas.
- (2) Untuk kendaraan roda dua dan roda tiga dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan ketentuan lebih kecil dari Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke bawah dan apabila sama atau lebih besar dari Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke atas.

Pasal 14

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2017 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam hal HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pasal 5 ayat 2 dalam bentuk Keputusan Gubernur yang ditandatangani; oleh Kepala Badan atas nama Gubernur.
- (4) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada a;, a* (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai ditetapkannya perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun

2016 tentang Pembahasan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR TAHUN 2017

LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017

**NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
 JENIS MOBIL PENUNJANG - SEDAN**

NO	KODING	MERKE	TYPE	TH BUAH	KIRI	ROBOT	DP PEB	PIS PRIBADI	PIS UMUM (KURUNG)	PIS DIKAS (MERAH)
1	101009 00130	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	131,000,000	1,025	134,275,000	2,014,125	805,650	671,375
2	101009 00230	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2000	126,000,000	1,025	129,150,000	1,937,250	774,900	645,750
3	101009 00230	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2001	131,000,000	1,025	134,275,000	2,014,125	805,650	671,375
4	101009 00230	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2002	135,000,000	1,025	138,375,000	2,075,625	830,250	691,875
5	101009 00230	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2003	154,000,000	1,025	157,850,000	2,367,750	947,100	789,250
6	101009 00230	ALFA ROMEO	156 BERLINA 2000cc	2004	170,000,000	1,025	174,250,000	2,613,750	1,045,500	871,250
7	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	188,000,000	1,025	192,700,000	2,890,500	1,156,200	963,900
8	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2002	194,000,000	1,025	198,850,000	2,982,750	1,193,100	994,250
9	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2003	199,000,000	1,025	203,975,000	3,059,625	1,223,850	1,019,875
10	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2004	218,000,000	1,025	223,450,000	3,351,750	1,340,700	1,117,250
11	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	117,000,000	1,025	119,925,000	1,798,875	719,550	599,625
12	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2001	125,000,000	1,025	128,125,000	1,921,875	768,750	640,625
13	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2002	128,000,000	1,025	131,200,000	1,968,000	787,200	656,000
14	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2003	131,000,000	1,025	134,275,000	2,014,125	805,650	671,375
15	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2004	145,000,000	1,025	148,625,000	2,229,375	891,750	743,125
16	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2005	178,000,000	1,025	182,450,000	2,736,750	1,094,700	912,250
17	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2006	202,000,000	1,025	207,050,000	3,105,750	1,242,300	1,035,250
18	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2007	223,000,000	1,025	228,575,000	3,428,625	1,371,450	1,142,875
19	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5 O-SYSTEM	2005	194,000,000	1,025	198,850,000	2,982,750	1,193,100	994,250
20	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5 SL	2003	142,000,000	1,025	145,550,000	2,183,250	873,300	727,750
21	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5 SL	2004	158,000,000	1,025	161,950,000	2,429,250	971,700	809,750

NO	KODING	MERREK	TYPE	TH BUAAT	RUBER	ROBOT	DP PER	PER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3140	600628 00327	XCMG	XG955-II(WHEEL LOADER	1993	370,000,000	1.0	370,000,000	740,000
3141	600696 00199	XUGONG	QY25K CRANE	2014	1,582,000,000	1.0	1,582,000,000	3,164,000
3142	600629 00010	XUZHOU	TANDEM ROLLER	1993	55,955,000	1.0	55,955,000	111,910
3143	600629 00010	XUZHOU	THREE WHEEL ROAD ROLLER 3T-8/10	1996	62,000,000	1.0	62,000,000	124,000
3144	600419 00112	YALE	G 710	2004	1,039,000,000	1.0	1,039,000,000	2,078,000
3145	600419 00212	YALE	L 180 (LOADER)	1999	1,163,000,000	1.0	1,163,000,000	2,326,000
3146	600419 00212	YALE	L 180 (LOADER)	2004	2,755,000,000	1.0	2,755,000,000	5,510,000
3147	600419 00312	YALE	L 70 C (WHEEL LOADER)	1996	863,000,000	1.0	863,000,000	1,726,000
3148	600419 00412	YALE	L 90 (PAY LOADER)	2000	473,000,000	1.0	473,000,000	946,000
3149	600419 00512	YALE	MOTOR GRADER	2004	2,794,000,000	1.0	2,794,000,000	5,588,000
3150	600419 00612	YALE	TD 40 KAI (WHEEL LOADER)	1997	1,027,000,000	1.0	1,027,000,000	2,054,000
3151	600674 00212	YANMAR	EF352T TRACTOR	2012	183,000,000	1.0	183,000,000	366,000
3152	600419 00613	YTO	FRONT SHOVEL 904 X840	2014	460,000,000	1.0	460,000,000	920,000
3153	600419 00613	YTO	TRACTOR 904 / 1058, 1059, 1221, 1222	2014	498,500,000	1.0	498,500,000	997,000
3154	600426 00125	YUEJIN	A81 B0 (FORKLIFT)	1997	213,000,000	1.0	213,000,000	426,000
3155	600426 00225	YUEJIN	B2 16A (FORKLIFT)	2003	378,000,000	1.0	378,000,000	756,000
3156	600426 00325	YUEJIN	CH0326/S.12402.0 (FORKLIFT)	1990	110,000,000	1.0	110,000,000	220,000
3157	600426 00425	YUEJIN	CMP30D (FORKLIFT)	2000	163,000,000	1.0	163,000,000	326,000
3158	600426 00525	YUEJIN	CT.0021/S.12430 (FORKLIFT)	1990	110,000,000	1.0	110,000,000	220,000
3159	600426 00625	YUEJIN	FL 480 (FORKLIFT 5 TON)	1996	157,000,000	1.0	157,000,000	314,000
3160	600426 00725	YUEJIN	NJ10 61	1991	87,000,000	1.0	87,000,000	174,000
3161	600426 00825	YUEJIN	YL6 16 (TYRED ROLLIES)	1990	187,000,000	1.0	187,000,000	374,000
3162	600426 00925	YUEJIN	ZYJ 10 (TD ROLLER) 10 TON	1990	188,000,000	1.0	188,000,000	376,000

AMPERAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL :
 MENTANG :
 KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017

NILAI JUAL UBAH BENTUK ENDARAAN BERMOTOR
 TAHUN 2017

KESTIFIKASIAN TAHUN	RIS	ST WAGON/ MINIBUS/ MICROBUS	DOUBLE CABIN	BERTAWAOK/ SEWAN / ROY & SEBESARNYA	TANJADI	BAL TRUCK TRUSMI/KAVALI TARJAL/RES	BAL TRUCK/RES	EMAR/BECK	MARIS	BESEK	CRANE	LOGGING TRUCK	CAR CABER	TRACTOR HEAVY/ TRABER	RIVER CONTAINER
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PKCK UP															
< 1990	---	4,000,000	3,000,000	5,000,000	6,000,000	---	---	---	3,000,000	3,000,000	---	---	---	---	---
1991 - 1994	---	5,000,000	4,000,000	6,000,000	7,000,000	---	---	---	4,000,000	4,000,000	---	---	---	---	---
1995 - 1997	---	7,000,000	5,000,000	7,000,000	8,000,000	---	---	---	5,000,000	5,000,000	---	---	---	---	---
1998 - 2000	---	10,000,000	6,000,000	10,000,000	15,000,000	---	---	---	7,000,000	7,000,000	---	---	---	---	---
2001 - 2002	---	15,000,000	8,000,000	16,000,000	18,000,000	---	---	---	8,000,000	8,000,000	---	---	---	---	---
2003 - 2004	---	20,000,000	10,000,000	21,000,000	25,000,000	---	---	---	10,000,000	10,000,000	---	---	---	---	---
2005 - 2006	---	22,000,000	12,000,000	23,000,000	27,000,000	---	---	---	12,000,000	12,000,000	---	---	---	---	---
2007 - 2008	---	25,000,000	15,000,000	25,000,000	30,000,000	---	---	---	15,000,000	15,000,000	---	---	---	---	---
2009 - 2010	---	30,000,000	20,000,000	27,000,000	35,000,000	---	---	---	17,000,000	17,000,000	---	---	---	---	---
2011	---	32,000,000	23,000,000	30,000,000	37,000,000	---	---	---	20,000,000	20,000,000	---	---	---	---	---
2012	---	35,000,000	25,000,000	32,000,000	40,000,000	---	---	---	23,000,000	23,000,000	---	---	---	---	---
2013	---	40,000,000	30,000,000	32,000,000	45,000,000	---	---	---	26,000,000	26,000,000	---	---	---	---	---
2014	---	42,000,000	32,000,000	33,000,000	47,000,000	---	---	---	28,000,000	28,000,000	---	---	---	---	---
2015	---	44,000,000	34,000,000	34,000,000	49,000,000	---	---	---	29,000,000	29,000,000	---	---	---	---	---
2016	---	45,000,000	35,000,000	35,000,000	50,000,000	---	---	---	30,000,000	30,000,000	---	---	---	---	---
2017	---	45,000,000	35,000,000	35,000,000	50,000,000	---	---	---	30,000,000	30,000,000	---	---	---	---	---
JHHT TRUCK (<5000 CC)															
< 1990	---	7,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	---	---	---	5,000,000	5,000,000	---	---	---	---	---
1991 - 1994	---	9,000,000	6,000,000	7,000,000	8,000,000	---	---	---	8,000,000	8,000,000	---	---	---	---	---
1995 - 1997	---	10,000,000	8,000,000	10,000,000	12,000,000	---	---	---	10,000,000	10,000,000	---	---	---	---	---
1998 - 2000	---	12,000,000	10,000,000	12,000,000	15,000,000	---	---	---	11,000,000	11,000,000	---	---	---	---	---
2001 - 2002	---	15,000,000	12,000,000	15,000,000	20,000,000	---	---	---	15,000,000	15,000,000	---	---	---	---	---
2003 - 2004	---	18,000,000	15,000,000	17,000,000	25,000,000	---	---	---	20,000,000	20,000,000	---	---	---	---	---
2005 - 2006	---	20,000,000	17,000,000	19,000,000	30,000,000	---	---	---	25,000,000	25,000,000	---	---	---	---	---
2007 - 2008	---	30,000,000	20,000,000	25,000,000	35,000,000	---	---	---	28,000,000	28,000,000	---	---	---	---	---
2009 - 2010	---	35,000,000	25,000,000	30,000,000	40,000,000	---	---	---	30,000,000	30,000,000	---	---	---	---	---
2011	---	40,000,000	27,000,000	35,000,000	45,000,000	---	---	---	31,000,000	31,000,000	---	---	---	---	---
2012	---	45,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	---	---	---	32,000,000	32,000,000	---	---	---	---	---
2013	---	50,000,000	35,000,000	42,000,000	57,000,000	---	---	---	33,000,000	33,000,000	---	---	---	---	---
2014	---	57,000,000	37,000,000	43,000,000	63,000,000	---	---	---	34,000,000	34,000,000	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
HYDRAULIC TANKS	RES	ST WAGON/ MINIBUS/ MOTORHOMES	DOUBLE CAB VEHICLES	ESTIMATED DEVAL / RES & RENTAL	TANKS	RAK TRUCK TERRAIN/AVAIL	RAK TRUCK/ TERRAIN/RES	TRAMP TRUCK	MIXER	DRERK	CRANE	LOADING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER	RIVER CONTAINER
< 1990	10,000,000	10,000,000	---	10,000,000	12,000,000	8,000,000	---	8,000,000	12,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	10,000,000	15,000,000	---
1991 - 1994	12,000,000	12,000,000	---	13,000,000	14,000,000	9,000,000	---	10,000,000	14,000,000	12,000,000	12,000,000	25,000,000	12,000,000	25,000,000	---
1995 - 1997	15,000,000	15,000,000	---	16,000,000	18,000,000	10,000,000	---	11,000,000	18,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	14,000,000	30,000,000	---
1998 - 2000	17,000,000	17,000,000	---	23,000,000	24,000,000	11,000,000	---	12,000,000	24,000,000	22,000,000	22,000,000	35,000,000	16,000,000	35,000,000	---
2001 - 2002	20,000,000	20,000,000	---	25,000,000	25,000,000	12,000,000	---	13,000,000	25,000,000	23,000,000	23,000,000	40,000,000	18,000,000	40,000,000	---
2003 - 2004	30,000,000	30,000,000	---	30,000,000	30,000,000	17,000,000	---	18,000,000	30,000,000	28,000,000	28,000,000	45,000,000	20,000,000	45,000,000	---
2005 - 2006	37,000,000	37,000,000	---	32,000,000	35,000,000	21,000,000	---	22,000,000	35,000,000	32,000,000	32,000,000	50,000,000	22,000,000	50,000,000	---
2007 - 2008	50,000,000	50,000,000	---	34,000,000	46,000,000	31,000,000	---	32,000,000	46,000,000	40,000,000	40,000,000	55,000,000	24,000,000	55,000,000	90,000,000
2009	60,000,000	60,000,000	---	36,000,000	48,000,000	33,000,000	---	34,000,000	48,000,000	42,000,000	42,000,000	60,000,000	26,000,000	60,000,000	95,000,000
2010	65,000,000	65,000,000	---	38,000,000	55,000,000	34,000,000	---	35,000,000	55,000,000	44,000,000	44,000,000	65,000,000	28,000,000	65,000,000	98,000,000
2011	66,000,000	66,000,000	---	40,000,000	60,000,000	35,000,000	---	36,000,000	60,000,000	45,000,000	45,000,000	66,000,000	30,000,000	70,000,000	100,000,000
2012	68,000,000	68,000,000	---	42,000,000	65,000,000	36,000,000	---	36,000,000	60,000,000	45,000,000	46,000,000	68,000,000	32,000,000	73,000,000	105,000,000
2013	70,000,000	70,000,000	---	44,000,000	67,000,000	37,000,000	---	38,000,000	67,000,000	47,000,000	47,000,000	70,000,000	33,000,000	74,000,000	110,000,000
2014	73,000,000	73,000,000	---	46,000,000	73,000,000	38,000,000	---	39,000,000	73,000,000	48,000,000	48,000,000	71,000,000	35,000,000	75,000,000	115,000,000
2015	75,000,000	75,000,000	---	50,000,000	75,000,000	39,000,000	---	40,000,000	74,000,000	49,000,000	49,000,000	73,000,000	39,000,000	79,000,000	118,000,000
2016	80,000,000	80,000,000	---	55,000,000	80,000,000	40,000,000	---	45,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000	40,000,000	80,000,000	120,000,000
2017	80,000,000	80,000,000	---	55,000,000	80,000,000	40,000,000	---	45,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000	40,000,000	80,000,000	120,000,000
TRUCK >5000 CC															